



Wagub Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD



JAWABAN: Wagub Kalbar Ria Norsan bersama Wakil Ketua DPRD Kalbar Suryansah saat paripurna jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap tiga Raperda yang diusulkan Pemprov Kalbar, Senin (1/7).

kemudahan untuk akses permodalan. "Untuk itu Pemprov terus mendorong agar Bank Kalbar terus mengembangkan sistem pelayanan dari sistem manual menjadi berbasis elektronik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk membayar pajak dan juga retribusi," ungkapnya.

Selain itu juga meminta Bank Kalbar terus mengembangkan pembangunan kantor-kantor cabang pembantu. Paling tidak sampai di kecamatan-kecamatan tertentu sehingga biaya operasional dapat lebih ditekan seminimal mungkin. "Diharapkan ke depannya tidak hanya Pemda yang berupaya membangun PAD, tetapi Bank Kalbar harus ikut serta dalam upaya meningkatkan PAD melalui pengembangan tempat pelayanan," katanya.

Sementara itu, terhadap perubahan Raperda atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, ia menyambut baik saran-saran yang disampaikan oleh pihak DPRD. Pemprov menuruti sependapat bahwa penataan perangkat daerah pada era otonomi daerah merupakan hal yang strategis dan sangat penting. Terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Penataan perangkat daerah digunakan dalam rangka mawadahi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota," imbuhnya.

Menyoal Tiga Rapaerda Usulan Pemprov

PONTIANAK- Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan memberikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap tiga Raperda yang diusulkan Pemprov Kalbar, Senin (1/7). Ketiga Raperda yang diusulkan diantaranya Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemprov Kalbar pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, serta Raperda Tentang Pramuwisata.

Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan, bahwa PT Bank Kalbar merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah. Sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Seperti diketahui dalam dua tahun terakhir PT Bank Kalbar mampu memberikan dividen yang signifikan terhadap Pemprov Kalbar.

Meski menurutnya PAD bukanlah satu-satunya tujuan utama Pemprov melakukan penyertaan modal pada Bank Kalbar. Namun yang lebih penting lagi agar masyarakat mendapatkan

Lalu untuk Raperda tentang pramuwisata dijelaskannya bahwa, pramuwisata adalah orang yang pertama kali dijumpai wisatawan dalam rangka mewujudkan harapan dan impian atas tur wisata yang telah dibayar. Karena wisatawan pasti akan membutuhkan bimbingan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

Untuk itu tugas pramuwisata lah yang menemani, mengarahkan, membimbing dan menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya. "Raperda tentang pramuwisata ini sangatlah penting dan diperlukan di

Kalbar," ucapnya. Mengingat masih belum adanya koordinasi antara Asosiasi Pramuwisata (Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalbar) dengan instansi terkait dalam hal pariwisata. Maka dari itu kemudian perlu adanya Perda Pramuwisata di Kalbar. "Dimana setiap daerah yang menginginkan pariwisata daerahnya berkembang, maka Pemda dituntut untuk berperan secara aktif dalam mengadopsi kebijakan pariwisata, membuat rencana, membuat Perda, serta mengembangkan prasarana dan akses," tutupnya. (bar/r)